



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG
RENCANA KERJA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) yang akan dijadikan sebagai pedoman bagi masing-masing Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Rencana Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2010-2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2011.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2010-2014, selanjutnya disebut Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2010-2014, adalah dokumen perencanaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode tahun 2010-2014.

2. Rencana ...

2. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL), adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2011, selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2011, adalah dokumen perencanaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode tahun 2011.

Pasal 2

Tujuan dan maksud penyusunan Rencana Kerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2011 adalah sebagai :

- a. penjabaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2010-2014;
- b. landasan bagi seluruh unit kerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah ditetapkan;
- c. penyesuaian Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2010-2014 untuk kebutuhan Rencana Kerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2011.

Pasal 3

Rencana Kerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2011 memuat rencana kegiatan dari seluruh Unit Kerja Eselon I dan II di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 4

Rencana Kerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2011 berfungsi sebagai bahan acuan evaluasi kinerja Unit Kerja Eselon I dan II di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 5 ...

Pasal 5

Rencana Kerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2010

 **MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,** 



ARMIDA S. ALISJAHBANA

DAFTAR ISI

BAB I	LATAR BELAKANG	1
	A. Kondisi Umum.....	1
	B. Identifikasi Masalah.....	1
BAB II	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	5
	A. Visi	5
	B. Misi	5
	C. Tujuan	6
	D. Sasaran	7
BAB III	KEBIJAKAN PRIORITAS TAHUN 2011	8
	A. Kebijakan Nasional.....	8
	B. Kebijakan Kementerian Negara PPN/Bappenas	8
	1. Program.....	9
	2. Kegiatan.....	10
BAB IV	PENUTUP	13

BAB I

LATAR BELAKANG

A. Kondisi Umum

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional memerintahkan kepada pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) K/L. Berdasarkan peraturan tersebut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) harus menyusun Renja Kementerian PPN/Bappenas tahun 2011 sebagai penjabaran tahun kedua dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas periode 2010-2014.

Penyusunan Renja Kementerian PPN/Bappenas tahun 2011 juga diarahkan untuk pencapaian visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas periode 2010-2014. Visi, misi dan tujuan Renstra Kementerian PPN/Bappenas periode 2010-2014 memuat peran yang harus dikembangkan dalam melaksanakan setiap kegiatannya, antara lain:

1. Peran sebagai **pengambil kebijakan/keputusan**. Kementerian PPN/Bappenas menentukan kebijakan dan program dalam rencana pembangunan nasional baik jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional), menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) maupun tahunan (Rencana Kerja Pemerintah). Untuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang bersifat tahunan, disusun berikut perkiraan anggarannya, sedangkan perkiraan anggaran untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dimulai sejak RPJMN 2010-2014. Selain tugas perencanaan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas juga turut berperan dalam menentukan kebijakan-kebijakan penanganan permasalahan yang mendesak dan

berskala ...

berskala besar, seperti penanganan pasca bencana alam dan perubahan iklim (*climate change*);

2. Peran sebagai **think tank**, Kementerian PPN/Bappenas melakukan kajian/telaahan/evaluasi kebijakan pembangunan baik sebagai masukan untuk penyusunan rencana pembangunan nasional maupun untuk perumusan kebijakan-kebijakan strategis lainnya;
3. Sebagai **koordinator**, Kementerian PPN/Bappenas antara lain melakukan berbagai kegiatan koordinatif dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik dalam rangka pelaksanaan tugas utama di bidang perencanaan maupun tugas-tugas lainnya dari Presiden, seperti: (i) penanganan pasca bencana yang memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan dengan lembaga lain; (ii) koordinasi perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan; (iii) koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, dan pengalokasian dana untuk pembangunan bersama Kementerian/Lembaga terkait; serta (iv) koordinasi kegiatan strategis sesuai penugasan; dan
4. Peran sebagai **administrator** yang dilakukan Kementerian PPN/Bappenas, antara lain: (i) pengelolaan dokumen perencanaan termasuk pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN); (ii) penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan; penyusunan dan pengelolaan laporan hasil evaluasi; serta (iii) pembinaan dan pelayanan administrasi umum.

Untuk mewujudkan peran dan kewenangan yang diharapkan tersebut, maka diperlukan rencana rinci yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan sebagai pelaksanaan dari Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan selanjutnya menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas-tugas di Kementerian PPN/Bappenas untuk tahun 2011.

B. Identifikasi Masalah

Dalam menjalankan perannya, Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra, Kementerian

PPN/Bappenas menemukan beberapa permasalahan yang dihadapi untuk tahun 2011. Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2011, kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) faktor, seperti:

1. Peraturan Perundang-undangan dan Sumber Daya Manusia Perencana Pembangunan

Landasan/Acuan hukum dalam rangka penyusunan rencana pembangunan nasional belum sepenuhnya terintegrasi secara baik. Hal ini terjadi akibat terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) perencana pembangunan di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang memiliki kompetensi untuk melakukan perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan secara baik dan akuntabel. Oleh karena itu, diharapkan instansi-instansi tersebut dapat menyediakan kualitas perencana yang berkualitas secara memadai. Dengan kondisi seperti ini, Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan perannya perlu:

- Meningkatkan kerjasama antarlembaga perencanaan baik pusat maupun daerah serta penguatan peran dan kewenangan lembaga perencanaan, memantapkan ketatalaksanaan dan meningkatkan kualitas aparatur perencanaan;
- Meningkatkan kualitas rencana pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus prioritas, kegiatan, serta rencana tindak yang terukur dan jelas;
- Mengembangkan sistem evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan;
- Membangun sistem dan peningkatan kualitas data/informasi perencanaan pembangunan; dan
- Meningkatkan kompetensi SDM perencana pembangunan di tingkat pusat dan daerah melalui diklat, bimbingan teknis, *focus group discussion*, seminar kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi di pusat dan di daerah.

2. Desentralisasi ...

2. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Pelaksanaan desentralisasi di era reformasi masih menimbulkan beragam penafsiran sehingga terkesan menciptakan kondisi yang kurang dapat dikendalikan. Hal ini disebabkan masih ada kecenderungan sebagian Pemerintah Daerah yang menafsirkan bahwa mereka memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam mengurus rumah tangganya tanpa memperhatikan hubungan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat. Banyak fakta yang menunjukkan bahwa implementasi otonomi daerah memunculkan fenomena yang sebelumnya tidak terpikirkan. Misalnya beberapa kasus konflik antardaerah dalam melakukan eksplorasi dan pengelolaan sumber daya alam, merenggangnya hubungan antarkelompok karena masalah-masalah geografis wilayah sehingga menimbulkan berbagai konsekuensi, seperti ketidakamanan dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian, dampak dari pelaksanaan desentralisasi dan otonomi tersebut adalah (i) meningkatnya konflik antardaerah dalam pemanfaatan/pengelolaan sumber daya alam, (ii) merenggangnya hubungan antarkelompok karena masalah geografis wilayah, (iii) semakin merosotnya mutu lingkungan dan sumber daya alam, dan (iv) angka kemiskinan yang masih besar. Adapun peran Kementerian PPN/Bappenas dalam menindaklanjuti/menangani permasalahan tersebut antara lain:

- Peningkatan fasilitasi dalam proses perencanaan pembangunan; dan
- Peningkatan koordinasi antara pusat dengan daerah, untuk menyusun dan menerapkan kebijakan/program penanganan permasalahan lingkungan hidup, sumber daya alam, kemiskinan (dan juga permasalahan lain) secara komprehensif dan terpadu.

3. Globalisasi

Potensi globalisasi yang dirasakan terhadap peran Kementerian PPN/Bappenas di antaranya semakin diakuinya nilai-nilai (*values*) universal, meningkatnya peran swasta dan masyarakat internasional dan meningkatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Pengaruh globalisasi juga memberikan permasalahan pada Kementerian

PPN/Bappenas dalam menjalankan perannya, seperti: (i) kemampuan adaptasi (demokratisasi) yang belum sesuai harapan, (ii) kemampuan persaingan yang lemah, dan (iii) kemampuan sumber daya manusia yang terbatas. Terhadap permasalahan-permasalahan tersebut, perlu diantisipasi langkah-langkah tindak lanjut seperti peningkatan kemampuan Kementerian PPN/Bappenas dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional yang dapat menjawab tantangan global yang semakin kompleks dengan perubahan yang sangat cepat.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

A. Visi Kementerian PPN/Bappenas

Salah satu keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2010-2014 dan RKP adalah penyusunan rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang berkualitas dan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari Presiden yang berkualitas. Kualitas rencana pembangunan tersebut dilihat dari: 1) adanya tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur; 2) adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah; 3) adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; serta 4) integrasi (keterkaitan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi pemerintahan baik di tingkat pusat (Renstra/Renja K/L) maupun daerah (RPJMD/RKPD/Renstra SKPD). Sedangkan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari Presiden dilihat dari sejauh mana tugas-tugas tersebut dimanfaatkan oleh Presiden.

Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka berarti Kementerian PPN/Bappenas telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian, target, sasaran, misi dan visi RPJMN 2010-2014, dan selanjutnya mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara sesuai amanat Undang Undang Dasar Tahun 1945, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Oleh karena itu, Visi Kementerian PPN/Bappenas 2010-2014 adalah: **"Mewujudkan Kementerian PPN/Bappenas yang andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara"**.

B. Misi ...

B. Misi Kementerian PPN/Bappenas

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan peran Kementerian PPN/Bappenas, adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dalam rangka:
 - a. mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan rencana pembangunan baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dengan daerah;
 - b. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
 - c. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
 - d. menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang; dan
3. Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas.

C. Tujuan Kementerian PPN/Bappenas

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan peta strategi, sebagai berikut:

1. Terwujudnya rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang berkualitas; dan
2. Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan nasional.

Tujuan pertama adalah sesuai dengan tugas pokok Kementerian PPN/Bappenas di bidang perencanaan pembangunan. Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas diharapkan mampu menghasilkan rencana pembangunan ...

Kementerian PPN/Bappenas diharapkan mampu menghasilkan rencana pembangunan nasional yang berkualitas, baik berupa RPJMN maupun RKP.

Sedangkan tujuan kedua, terkait dengan tugas-tugas lain (penugasan khusus) yang diberikan Presiden kepada Kementerian PPN/Bappenas, misalnya dalam hal penanganan masalah-masalah yang memerlukan penanganan lintas instansi dan lintas sektor/bidang dengan skala besar, misalnya koordinasi penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana gempa dan tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias; serta penilaian terhadap perkiraan kerusakan dan kerugian (*damages and losses assessment*) yang diakibatkan oleh bencana gempa bumi Sumatera Barat, sekaligus menilai kebutuhan (*needs assessment*) pemulihan pasca bencana; koordinasi penanganan perubahan iklim (*climate change*), dan sebagainya.

D. Sasaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2011

Mengacu pada ukuran atau indikator kinerja dari keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2010-2014 tersebut, maka indikator kinerja (ukuran keberhasilan) yang juga menjadi sasaran untuk kedua tujuan Kementerian PPN/Bappenas pada tahun anggaran 2011 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran dari Tujuan Pertama: “Terwujudnya rencana pembangunan jangka menengah nasional dan tahunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas”, adalah:
 - a) Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi rencana pembangunan antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, yang diukur dari (indikator):
 - i. % kesesuaian antara muatan rancangan RKP dengan RPJMN; dan
 - ii. % kesesuaian Renja K/L dengan target/sasaran dalam rancangan RKP;
 - b) Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap RKP, diukur dari:
 - i. Pendapat *stakeholders* tentang proses penyusunan RKP; dan
 - ii. Pendapat *stakeholders* tentang dokumen RKP yang telah ditetapkan;

2. Sasaran ...

2. Sasaran dari tujuan kedua: “Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden dalam kaitan dengan kebijakan pembangunan nasional”, adalah persentase (%) tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas (penugasan khusus) dari Presiden.

Berangkat dari sasaran tahun 2011 di atas, target pembangunan Kementerian PPN/Bappenas tahun 2011 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**TARGET PEMBANGUNAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
TAHUN ANGGARAN 2011**

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME	INDIKATOR	TARGET 2011	PELAKSANA
Program Perencanaan Pembangun- an Nasional	1. Terwujudnya rencana pembangunan nasional (RPJMN) dan RKP) yang berkualitas 2. Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden dalam kaitan kebijakan pembangunan nasional	1. % kesesuaian antara muatan rancangan RKP dengan RPJMN	100%	Unit Kerja Eselon I dan II di lingkungan Kedeputian
		2. % kesesuaian rancangan Renja K/L dengan target/sasaran dalam rancangan RKP	100%	
		3. Pendapat <i>stakeholders</i> tentang proses penyusunan dokumen RKP	Cukup baik	
		4. Pendapat <i>stakeholders</i> tentang dokumen RKP yang telah ditetapkan	Cukup baik	
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya	Terlaksananya dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tupoksi Kementerian PPN/Bappenas	1. % pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian PPN/Bappenas melalui penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia	80%	Unit Kerja Eselon I dan II di lingkungan Setmen PPN/Settama Bappenas dan Staf Ahli Menteri
		2. Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap pelayanan Kementerian PPN/Bappenas	Baik	
		3. % fasilitasi dan pembinaan di bidang perencanaan pembangunan nasional dengan mitra kerja, baik di pusat maupun daerah	Baik	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Kementerian	1. % ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PPN/Bappenas	100%	Setmen PPN/Settama Bappenas (Biro Umum)
		2. Terlaksananya	100%	

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME	INDIKATOR	TARGET 2011	PELAKSANA
	PPN/Bappenas	pembangunan gedung baru Bappenas		
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas	Meningkatnya akuntabilitas dan pengawasan aparatur Kementerian PPN/Bappenas	1. Opini WTP dari BPK	Baik	Unit Kerja Eselon I dan II di lingkungan Inspektorat Utama Bappenas
		2. Standar penilaian good governance	Baik	
		3. Standar penilaian AKIP	Baik	

BAB III

KEBIJAKAN PRIORITAS TAHUN 2011

A. Kebijakan Nasional

Dengan berbagai permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, pelaksanaan RPJMN 2010-2014 menentukan 11 (sebelas) Prioritas Pembangunan Nasional, yaitu: 1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; 2) Pendidikan; 3) Kesehatan; 4) Penanggulangan Kemiskinan; 5) Ketahanan Pangan; 6) Infrastruktur; 7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha; 8) Energi; 9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; 10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Teluar dan Pasca Konflik; dan 11) Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi.

Selain kesebelas Program Prioritas tersebut, terdapat pula Prioritas Bidang Hukum dan Aparatur (Buku II RPJMN 2010-2014) yang menjadi acuan Renstra Kementerian PPN/Bappenas, yaitu Peningkatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dengan 4 (empat) fokus prioritas, sebagai berikut: 1) peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; 2) peningkatan kualitas pelayanan publik; 3) peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; dan 4) pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi. Prioritas dan keempat fokus prioritas tersebut mengandung makna perbaikan atau peningkatan kinerja.

B. Kebijakan Kementerian PPN/Bappenas

Sejalan dengan prioritas nasional, Kementerian PPN/Bappenas juga telah menentukan arah kebijakan yang akan dilaksanakan tahun 2011, antara lain:

1. Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui penataan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan nasional; serta peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan;

2. Penerapan perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran yang berbasis kinerja;
3. Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan;
4. Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan; dan
5. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga dan pegawai.

Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan internal:

Eksternal:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran sektoral, lintas sektoral dan wilayah, dan antara pusat dan daerah; serta keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
2. Meningkatkan kualitas pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional;
3. Meningkatkan kualitas evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional;
4. Meningkatkan kualitas kajian dan atau evaluasi kebijakan pembangunan; dan
5. Meningkatkan kualitas koordinasi kebijakan pembangunan nasional.

Internal:

1. Membangun Manajemen Kinerja dari kinerja lembaga hingga kinerja individu/pegawai;
2. Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif, dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai;
3. Meningkatkan kompetensi SDM di Kementerian PPN/Bappenas dan perencana di tingkat pusat dan daerah secara lebih proporsional dan akuntabel;

4. Melanjutkan ...

4. Melanjutkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Kementerian PPN/Bappenas; dan
5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.

Sebagai instrumen dalam menjalankan kebijakan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas (sesuai Renstra Kementerian PPN/Bappenas periode 2010-2014) telah menetapkan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program

Mulai tahun 2011, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 4 (empat) program yaitu: (i) Program Perencanaan Pembangunan Nasional, (ii) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya, (iii) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan (iv) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur. Keempat program tersebut kemudian dikelompokkan menjadi program teknis (utama) yaitu Program Perencanaan Pembangunan Nasional dan program generik (pendukung) yang terdiri atas Program Dukungan Manajemen, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, dan Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur.

Jumlah program pada tahun 2011 lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2010. Jumlah program pada tahun 2010, Kementerian PPN/Bappenas masih mengacu pada Renstra periode 2005-2009 dengan menggunakan 5 (lima) program, yaitu: (i) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, (ii) Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik, (iii) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara, (iv) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara, dan (v) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur.

Penetapan 4 (empat) program dan perubahan nomenklatur program pada tahun 2011 lebih menekankan pada kesesuaian terhadap pelaksanaan tupoksi, peran dan kewenangan Kementerian

PPN/Bappenas sebagai lembaga perencana pembangunan nasional sehingga nantinya akan lebih memudahkan pengukuran kinerjanya.

2. Kegiatan

Selanjutnya, program-program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan prioritas Kementerian PPN/Bappenas, sebagai berikut:

a. Kegiatan-kegiatan utama pada Program Perencanaan Pembangunan Nasional dilaksanakan oleh seluruh unit kerja eselon I dan II lingkup kedeputian, seperti:

- 1) Penyusunan rencana pembangunan nasional dan pendanaan/penganggarnya, baik antarwaktu, sektor, wilayah maupun antartingkat/fungsi pemerintahan;
- 2) Pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional;
- 3) Evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional, dan kajian serta evaluasi kebijakan pembangunan sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau perumusan kebijakan pembangunan;
- 4) Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan; dan
- 5) Koordinasi dalam melaksanakan perencanaan pembangunan nasional; dan

b. Kegiatan pada ketiga program generik (pendukung) dilaksanakan oleh seluruh unit kerja eselon I dan II lingkup Setmen PPN/Settama, Inspektorat Utama dan Staf Ahli Menteri PPN, seperti:

- 1) Peningkatan kapasitas instansi/unit perencanaan di pusat dan di daerah;
- 2) Penyempurnaan ketatalaksanaan;
- 3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kementerian PPN/Bappenas dan aparatur perencana di instansi tingkat pusat dan daerah;
- 4) Peningkatan fasilitas kerja, gedung, kantor, sarana dan prasarana kerja lainnya;

5) Pengawasan ...

- 5) Pengawasan pelaksanaan kinerja dan anggaran Kementerian PPN/Bappenas;
- 6) Peningkatan kualitas kehumasan dalam rangka membangun citra positif lembaga (*brand image building*);
- 7) Peningkatan kualitas sistem data dan informasi perencanaan pembangunan;
- 8) Pelaksanaan kegiatan pendukung lainnya; dan
- 9) Peningkatan intensitas kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi di pusat dan di daerah.

Sejalan dengan ditetapkannya program dan kegiatan di atas, Kementerian PPN/Bappenas untuk tahun anggaran 2011 (sesuai Pagu Definitif Tahun 2011 yang dikeluarkan Menteri Keuangan melalui Surat Edaran Menteri Keuangan No. SE-676/MK.02/2010) memperoleh anggaran sebesar Rp. 669,42 Milyar. Anggaran tersebut terdiri atas Rupiah Murni sebesar Rp. 449,51 Milyar dan PHLN sebesar Rp. 249,91 Milyar. Rincian pendistribusian alokasi anggaran menurut program adalah sebagai berikut:

Rp. juta

No	Program	RM	PHLN	Total
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya	266.811	149.906	416.717
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	60.000	-	60.000
3	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur	3.700	-	3.700
4	Perencanaan Pembangunan Nasional	119.000	100.000	219.000
	Jumlah	449.511	249.906	669.417

Alokasi pagu definitif di atas mengalami perubahan/penyesuaian dari alokasi Pagu Indikatif dan Rancangan Awal RKP Tahun 2011 disampaikan melalui Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan No. 0181/M.PPN/04/2010 dan SE-120/MK/2010 tanggal 6 April 2010, yaitu untuk Kementerian PPN/Bappenas sebesar Rp. 660,42 Milyar. Perubahan/penyesuaian tersebut disebabkan adanya realokasi dari Belanja Lain-lain untuk kegiatan Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemda (P2MPD) sebesar Rp. 9,0 Miliar. Perubahan/penyesuaian ini dijelaskan dalam Surat Edaran Menteri Keuangan No. SE-294/MK.02/2010 tentang Pagu Sementara Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2011.

Selanjutnya, berdasarkan komposisi tabel di atas, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya lebih besar dibandingkan dengan Program Perencanaan Pembangunan Nasional (program teknis). Hal ini disebabkan, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya merupakan penggabungan dari 3 (tiga) program yang ada pada tahun 2010, yaitu Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik, Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur dan Program Penataan Kelembagaan dan Ketetalaksanaan (khusus Setmen/Settama dan Staf Ahli).

Rincian masing-masing program, kegiatan dan anggarannya tersebut terdapat pada Anak Lampiran.

BAB IV
PENUTUP

Renja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2011 merupakan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2011 Kementerian PPN/Bappenas. Renja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2011 telah sesuai dengan Pagu Definitif Tahun 2011 yang dikeluarkan Menteri Keuangan, memuat program, kegiatan dan anggaran yang pada akhirnya dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Negara PPN/Bappenas Tahun 2011.

Dengan disahkannya DIPA tersebut maka unit kerja eselon I dan II dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dengan memerhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

 **MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL** 



ARMIDA S. ALISJAHBANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR PER. 6 /M.PPN/12/2010
TANGGAL 30 DESEMBER 2010

RENCANA KERJA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN 2011

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

ANAK LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR PER 6 /M.PPN/12/2010
TANGGAL 30 DESEMBER 2010

NO	PROGRAM/UNIT KERJA ESELON I DAN II/ KOMPONEN	RM	PHLN	TOTAL
1	2	3	4	5=(3+4)
I	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	266,811,000	149,906,000	416,717,000
	STAF AHLI MENTERI PPN	2,027,545	-	2,027,545
	1.1 Kajian Efektivitas Sistem Pengawasan Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Kementerian/Lembaga	399,992	-	399,992
	1.2 Kajian Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)	399,983	-	399,983
	1.3 Telaahan Efektifitas Keberadaan, Wewenang dan Fungsi Unsur Pengarah BPPD Dalam Sistem Penanggulangan Bencana	396,070	-	396,070
	1.4 Kajian Pembangunan Perdesaan dengan Integrasi Pendekatan Wilayah dan Kegiatan Sektoral	437,950	-	437,950
	1.5 Kajian Penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Menurut UU Nomor 26 Tahun 2007	393,550	-	393,550
	SEKRETARIS MENTERI PPN/SEKRETARIS UTAMA BAPPENAS	264,783,455	149,906,000	414,689,455
	1 Pusat Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan	6,602,145	-	6,602,145
	1.1 Pengembangan dan Pemeliharaan Konten Database (Data Dictionary)	384,000	-	384,000
	1.2 Monitoring Evaluasi dan Sosialisasi Kegiatan PUSDATIN	296,000	-	296,000
	1.3 Pengembangan Sistem Informasi	925,800	-	925,800
	1.4 Pengembangan Aplikasi Jejaring Kerja	1,480,000	-	1,480,000
	1.5 Pendataan dan Penataan dokumen Arsip Inaktif	294,500	-	294,500
	1.6 Pedoman Jadwal Retensi Arsip	309,680	-	309,680
	1.7 Pedoman Pola Klasifikasi Arsip	213,880	-	213,880
	1.8 Sewa Layanan Akses Sistem Digital Jurnal	760,000	-	760,000
	1.9 Pelesterian dan Penyusunan Arsip	104,490	-	104,490
	1.10 Pemeliharaan dan Pengembangan E-Planning dan E-Money	1,000,000	-	1,000,000
	1.11 Koordinasi Database Perencanaan Pembangunan	296,995	-	296,995
	1.12 Kajian Rancang Bangun Fasilitas DSS	536,800	-	536,800
	2 Biro Humas dan TUP	6,068,513	-	6,068,513
	1.1 Fasilitasi Bahan Pimpinan	296,348	-	296,348
	1.2 Fasilitasi Kegiatan Keprotokolan	253,806	-	253,806
	1.3 Fasilitasi Persidangan	292,479	-	292,479
	1.4 Diseminasi Produk-Produk Kementerian PPN/Bappenas	1,116,700	-	1,116,700
	1.5 Pelayanan Kehumasan, Keprotokolan/Persidangan dan Ketatausahaan Pimpinan	1,490,325	-	1,490,325
	1.6 Pelayanan Informasi Publik dan Pers	1,113,380	-	1,113,380
	1.7 Publikasi Informasi Musrenbang	1,505,475	-	1,505,475
	3 Biro Sumber Daya Manusia	3,646,000	-	3,646,000
	1.1 Koordinasi Pembinaan Jabatan Fungsional	550,000	-	550,000
	1.2 Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia	357,000	-	357,000
	1.3 Koordinasi Pembinaan Baperjakat	489,000	-	489,000
	1.4 Koordinasi Pembinaan Kepangkatan Pegawai	365,000	-	365,000

1.5 Rekrutmen ...

NO	PROGRAM/UNIT KERJA ESELON I DAN II/ KOMPONEN	RM	PHLN	TOTAL
1	2	3	4	5=(3+4)
	1.5 Rekrutmen Pegawai Baru	500,000	-	500,000
	1.6 Evaluasi Penerapan Sanksi PNS dan Kode Etik	435,000	-	435,000
	1.7 Pengembangan Sistem Informasi SDM Bappenas	500,000	-	500,000
	1.8 Evaluasi Kompetensi Manajerial SDM	450,000	-	450,000
4	Biro Hukum	1,690,190	-	1,690,190
	1.1 Koordinasi Litigasi dan Pendampingan Hukum	363,040	-	363,040
	1.2 Koordinasi Pengembangan dan Penyadaran Hukum	711,360	-	711,360
	1.3 Koordinasi di Bidang Peraturan Perundang-Undangan	300,000	-	300,000
	1.4 Koordinasi Non Litigasi	315,790	-	315,790
5	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana	2,850,000	-	2,850,000
	1.1 Koordinasi Peningkatan Kapasitas Organisasi Kementerian PPN/Bappenas	400,000	-	400,000
	1.2 Koordinasi Penataan Ketatalaksanaan	350,000	-	350,000
	1.3 Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan/ Program di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas tahun 2011	500,000	-	500,000
	1.4 Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan	350,000	-	350,000
	1.5 Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran	425,000	-	425,000
	1.6 Koordinasi Kelembagaan Perencanaan	325,000	-	325,000
	1.7 Koordinasi Penyusunan Info Kajian Bappenas	500,000	-	500,000
6	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya	32,009,620	-	32,009,620
	1.1 Penyusunan RKP 2012	800,000	-	800,000
	1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan (termasuk koordinasi Musrenbangprop)	22,759,620	-	22,759,620
	1.3 Musyawarah Perencanaan Pembangunan	5,000,000	-	5,000,000
	1.4 Koordinasi Pengelolaan Keuangan	600,000	-	600,000
	1.5 Sekretariat Pengadaan Barang dan Jasa Bappenas	900,000	-	900,000
	1.6 Koordinasi Pembinaan Pegawai	300,000	-	300,000
	1.7 Sekretariat PPK II Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas	250,000	-	250,000
	1.8 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	400,000	-	400,000
	1.9 Koordinasi Tim Anggaran	400,000	-	400,000
	1.10 Koordinasi Pengelolaan dan Pemanfaatan PHLN	300,000	-	300,000
	1.11 Koordinasi Pemantauan RAN PK	300,000	-	300,000
7	Pendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Sesuai Tupoksi	165,555,411	-	165,555,411
	1.1 Pengelolaan Gaji, Honorarium, dan Tunjangan	43,632,597	-	43,632,597
	1.2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	26,006,558	-	26,006,558
	1.3 Pelayanan Publik atau Birokrasi	13,932,296	-	13,932,296
	1.4 Penyusunan Program dan Rencana Kerja Program	81,983,960	-	81,983,960
8	Biro Umum	5,224,486	-	5,224,486
	1.1 Koordinasi Urusan Dalam	296,277	-	296,277
	1.2 Koordinasi Pengelolaan Keuangan	543,260	-	543,260
	1.3 Koordinasi Verifikasi Anggaran	405,400	-	405,400
	1.4 Koordinasi Perlengkapan dan Tata Usaha	301,150	-	301,150
	1.5 Penghapusan dan Pelelangan Barang Inventaris	84,940	-	84,940
	1.6 Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara PPN/Bappenas	669,750	-	669,750
	1.7 Penatausahaan Pengujian Perintah Pembayaran	220,700	-	220,700
	1.8 Rekonsiliasi Pembukuan Anggaran	131,700	-	131,700
	1.9 Pengelolaan Kegiatan PPK Pelayanan dan Keuangan	148,500	-	148,500

1.10 Diseminasi ...

NO	PROGRAM/UNIT KERJA ESELON I DAN II/ KOMPONEN	RM	PHLN	TOTAL
1	2	3	4	5=(3+4)
1.10	Diseminasi Pelaksanaan Penatausahaan Kas dan Pelaporan Keuangan	152,205	-	152,205
1.11	Inventarisasi Barang Milik Negara	301,150	-	301,150
1.12	Penatausahaan Perencanaan Kas	139,140	-	139,140
1.13	Penyerahan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	151,084	-	151,084
1.14	Penyusunan Laporan Barang Milik Negara	114,632	-	114,632
1.15	Penyusunan Rencana Kegiatan	296,511	-	296,511
1.16	Penyusunan Laporan Pajak	285,110	-	285,110
1.17	Penatausahaan Pembukuan Anggaran	554,024	-	554,024
1.18	Workshop Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK BMN)	162,138	-	162,138
1.19	Workshop Sistem Akuntansi Keuangan	266,815	-	266,815
9	Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana	41,137,090	149,906,000	191,043,090
	<i>A. FHRDP III LOAN/JICA IP-535</i>	39,015,484	115,855,617	154,871,101
1.1	Dukungan Administrasi dan Manajemen PHLN (termasuk Konsultan JBIC)	1,233,340	16,549,057	17,782,397
1.2	Program Magang	237,632	2,149,632	2,387,264
1.3	Penyempurnaan Desain Kurikulum Diklat Non Gelar dan Rapat Koordinasi Diklat Non Gelar	237,207	-	237,207
1.4	Koordinasi dan Rintisan Program	81,000	-	81,000
1.5	Pemantauan dan Evaluasi Diklat dan JFP	764,400	-	764,400
1.6	Diklat Non Gelar	12,248,969	17,238,219	29,487,188
1.7	Diklat Gelar	19,422,132	79,078,709	98,500,841
1.8	Pendaftaran dan Seleksi Gelar	1,885,800	-	1,885,800
1.9	Fasilitasi dan Akreditasi JFP dan Diklat	108,400	-	108,400
1.10	Penilaian Angka Kredit Perencana	131,800	-	131,800
1.11	Penyempurnaan Juknis Penilaian angka Kredit Perencana	75,000	-	75,000
1.12	Pengembangan Sistem Distance Learning (Pembinaan Diklat Perencana Daerah menggunakan Sistem Jarak Jauh)	282,150	840,000	1,122,150
1.13	Workshop Pengelolaan Majalah Simpul	81,130	-	81,130
1.14	Lokakarya Pusbindiklatren	113,450	-	113,450
1.15	Sosialisasi JFP dan Diklat	233,410	-	233,410
1.16	Seminar Regional Jabatan Fungsional JFP	172,173	-	172,173
1.17	Penyempurnaan Buku Panduan dan Pedoman Diklat	241,800	-	241,800
1.18	Penyusunan Pedoman Kerja Pusbindiklatren dan PPSDMA	115,670	-	115,670
1.19	Penerbitan Majalah Simpul Perencana	143,573	-	143,573
1.20	Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Kelembagaan	322,200	-	322,200
1.21	Seminar LERD dan IDPP	129,000	-	129,000
1.22	Workshop Penilaian Angka Kredit Perencana	105,130	-	105,130
1.23	Workshop Administrasi Penilaian Angka Kredit Perencana	83,400	-	83,400
1.24	Rapat Koordinasi Diklat Gelar dan Non Gelar	340,736	-	340,736
1.25	Kajian Pengembangan Standar Kompetensi Perencana	225,982	-	225,982
	<i>B. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pendukung Reformasi Birokrasi Aparatur (pendanaan World Bank)</i>	2,121,606	34,050,383	36,171,989
1.1	Pendaftaran dan Seleksi	300,300	-	300,300
1.2	Dukungan Administrasi dan Manajemen PHLN (termasuk Konsultan JBIC)	525,676	2,458,000	2,983,676
1.3	Pemantauan dan Evaluasi Diklat	443,080	-	443,080

1.4 Pelaksanaan ...

NO	PROGRAM/UNIT KERJA ESELON I DAN II/ KOMPONEN	RM	PHLN	TOTAL
1	2	3	4	5=(3+4)
	1.4 Pelaksanaan Diklat Gelar dalam rangka Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pendukung Reformasi Birokrasi Aparatur	105,000	17,173,988	17,278,988
	1.5 Pelaksanaan Diklat Non Gelar dalam rangka Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pendukung Reformasi Birokrasi Aparatur	-	14,418,395	14,418,395
	1.6 Pemantauan dan Evaluasi Diklat	747,550	-	747,550
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BAPPENAS	60,000,000	-	60,000,000
	1 Biro Umum			
	1.1 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	752,820	-	752,820
	1.2 Peningkatan Fasilitas Pelayanan Umum dan Operasional	54,969,721	-	54,969,721
	1.3 Peningkatan Kualitas Pendukung Pelayanan Umum dan Operasional	4,277,459	-	4,277,459
III	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR BAPPENAS	3,700,000	-	3,700,000
	1 Inspektorat Bidang Administrasi Umum	2,413,000	-	2,413,000
	1.1 Kegiatan Inspektorat Utama	575,000	-	575,000
	1.2 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	200,000	-	200,000
	1.3 Pemeriksaan / Audit	325,000	-	325,000
	1.4 Kegiatan Penyusunan UPKPT, Reviu LAPKEU, LAP.KINERJA, TOR dan RAB	225,000	-	225,000
	1.5 Seminar Ketaatan Pengguna Anggaran	45,000	-	45,000
	1.6 Koordinasi Pengawasan Anggaran	150,000	-	150,000
	1.7 Monitoring Hasil Pengawasan Anggaran	250,000	-	250,000
	1.8 Rencana Aksi mempertahankan Opini Laporan Keuangan	200,000	-	200,000
	1.9 Rencana Aksi Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	180,000	-	180,000
	1.10 Peningkatan Kompetensi Profesi Auditor secara berkelanjutan	163,000	-	163,000
	1.11 Penyusunan Kode Etik Auditor Inspektorat Utama	100,000	-	100,000
	2 Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan	1,287,000	-	1,287,000
	1.1 Pelaksanaan Pre Audit dan Current audit	164,330	-	164,330
	1.2 Pengawasan Kinerja Kegiatan Kajian dan Penyusunan Policy Paper	200,832	-	200,832
	Pengawasan Kinerja Kegiatan Kajian dan Penyusunan Policy Paper	288,960	-	288,960
	1.3 Monitoring Pengawasan Kinerja Kelembagaan	147,442	-	147,442
	1.4 Penyempurnaan Pedoman Penilaian Pengawasan Manajemen Tupoksi dan Program/Kegiatan	187,060	-	187,060
	1.5 Koordinasi Pengawasan Kinerja Kelembagaan	246,048	-	246,048
	1.6 Peningkatan Kompetensi Profesi Berkelanjutan Kementerian PPN/Bappenas TA 2011	52,328	-	52,328
IV	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	119,000,000	100,000,000	219,000,000
1	<u>KEDEFUTIAN BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEBUDAYAAN</u>	11,990,000	9,898,155	21,888,155
	1 Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	2,860,000	8,098,155	10,958,155

1.1 Policy ...

NO	PROGRAM/UNIT KERJA ESELON I DAN II/ KOMPONEN	RM	PHLN	TOTAL
1	2	3	4	5=(3+4)
1.1	Policy Paper Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat	100,000	-	100,000
1.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat	350,000	-	350,000
1.3	Pemantauan Pelaksanaan RKP Tahun 2011 Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat	250,000	-	250,000
1.4	Evaluasi Pelaksanaan RKP Tahun 2010 Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat	300,000	-	300,000
1.5	Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerjasama RI-Unicef 2011-2015	300,000	-	300,000
1.6	Koordinasi Pengelolaan Proyek PHLN Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat	250,000	-	250,000
1.7	Hibah-Kerjasama RI-Unicef	-	6,098,155	6,098,155
1.8	Koordinasi Pengelolaan Proyek Hibah Assistance For Rice Fortification For The Poor (JFPR-ADB Project)	200,000	2,000,000	2,200,000
1.9	Koordinasi Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi TA 2011-2015	1,000,000	-	1,000,000
	Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi DAK	110,000	-	110,000
2	Direktorat Agama dan Pendidikan	4,260,000	-	4,260,000
2.1	Kajian tentang Strategi Pendanaan Pendidikan	400,000	-	400,000
2.2	Koordinasi Perencanaan dan Penyusunan Program Pembangunan Nasional Bidang Agama dan Pendidikan	300,000	-	300,000
2.3	Pemantauan Perencanaan Pembangunan Nasional (RKP) Bidang Agama dan Pendidikan	300,000	-	300,000
2.4	Evaluasi Pelaksanaan RKP 2010 Bidang Agama dan Pendidikan TA 2011	300,000	-	300,000
2.5	Koordinasi Strategis Perencanaan Kebijakan PHLN Bidang Agama dan Pendidikan	350,000	-	350,000
2.6	Koordinasi Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian MDGs	2,500,000	-	2,500,000
2.7	Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pemantauan dan Evaluasi DAK Bidang Agama dan Pendidikan	110,000	-	110,000
3	Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan	2,610,000	1,800,000	4,410,000
3.1	Kajian Harmonisasi Kebijakan Pembangunan Keluarga Berencana	400,000	-	400,000
3.2	Evaluasi Pelaksanaan Uji Coba Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender	475,000	-	475,000
3.3	Koordinasi Perencanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	500,000	-	500,000
3.4	Pemantauan Pelaksanaan RKP 2011 Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	375,000	-	375,000
3.5	Koordinasi Pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah RI-UNFPA Siklus Ke-8 (2011-2015)	750,000	-	750,000
3.6	Kegiatan Program Bantuan Hibah, UNFPA Siklus ke-8 (2011-2015)	-	1,800,000	1,800,000
3.7	Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi DAK	110,000	-	110,000
4	Direktorat Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	2,260,000	-	2,260,000
4.1	Kajian Strategi Peningkatan Sarana Dan Prasarana Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga Di Era Desentralisasi	400,000	-	400,000

NO	PROGRAM/UNIT KERJA ESELON I DAN II/ KOMPONEN	RM	PHLN	TOTAL
1	2	3	4	5=(3+4)
4.2	Evaluasi Pembangunan Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga	400,000	-	400,000
4.3	Pemantauan Pelaksanaan RKP 2011 Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga	400,000	-	400,000
4.4	Koordinasi Perencanaan Kebijakan Dan Program Pembangunan Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga	300,000	-	300,000
4.5	Sekretariat PPK Deputi SDM dan Kebudayaan	250,000	-	250,000
4.6	Koordinasi Perencanaan Kebijakan Dan Program Pembangunan Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga	400,000	-	400,000
4.7	Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi DAK	110,000	-	110,000
2	KEDEPUTIAN BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN	11,075,328	883,600	11,958,928
1	Direktorat Aparatur Negara	4,421,440	-	4,421,440
1.1	Policy Paper: Analisa Kelembagaan Birokrasi Untuk Mendukung Peningkatan Daya Saing Nasional	100,000	-	100,000
1.2	Kajian: Analisis Efisiensi Belanja Aparatur Dalam Birokrasi	400,000	-	400,000
1.3	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Nasional (RKP) Bidang Aparatur Negara Tahun 2011	300,000	-	300,000
1.4	Pemantauan Pelaksanaan Program Pembangunan Penciptaan Tata Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa	300,000	-	300,000
1.5	Evaluasi Pelaksanaan RFJMN 2004-2009 Bidang Penciptaan Tata Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa	300,000	-	300,000
1.6	Koordinasi Pendukung Kebijakan Reformasi Audit Publik (STAR-SDP)	1,800,000	-	1,800,000
1.7	Koordinasi Pendukung Kebijakan Reformasi Audit Publik (STAR-SDP II)	421,440	-	421,440
1.8	Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan Yang Baik (<i>Good Public Government</i>)	300,000	-	300,000
1.9	Koordinasi Perencanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Bidang Polhukhankam	300,000	-	300,000
1.10	Sekretariat PPK	200,000	-	200,000
2	Direktorat Hukum dan HAM	2,118,045	-	2,118,045
1.1	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemberantasan Korupsi	1,300,000	-	1,300,000
1.2	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Nasional (RKP) Bidang Hukum dan HAM	299,560	-	299,560
1.3	Evaluasi Perencanaan Pembangunan Nasional (RKP) 2010 Bidang Hukum dan HAM	187,660	-	187,660
1.4	Policy Paper Hukum dan HAM	100,000	-	100,000
1.5	Pemantauan Perencanaan Pembangunan Nasional (RKP) Bidang Hukum dan HAM	230,825	-	230,825
3	Direktorat Pertahanan dan Keamanan	1,200,000	-	1,200,000
1.1	Kajian Studi Industri Strategis Pertahanan Dalam Perspektif Minimum Essential Force (MEF)	400,000	-	400,000
1.2	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Pertahanan dan Keamanan : RKP dan Percepatan Program Revitalisasi Industri Hankam Nasional	300,000	-	300,000

1.3 Pemantauan ...

NO	PROGRAM/UNIT KERJA ESELON I DAN II/ KOMPONEN	RM	PHLN	TOTAL
1	2	3	4	5=(3+4)
	1.3 Pemantauan Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Pertahanan dan Keamanan : RKP dan Percepatan Program Revitalisasi Industri Hankam Nasional	250,000	-	250,000
	1.4 Evaluasi Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010	250,000	-	250,000
4	Direktorat Politik, Komunikasi, dan Informasi	1,729,843	883,600	2,613,443
	1.1 Kajian Policy Paper Bidang Politik dan Komunikasi Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) II (2010-2014) Bidang Politik dan Komunikasi Tahun Pertama (2010)	400,000	-	400,000
	1.2 Pemantauan Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Politik dan Komunikasi Tahun 2011	255,514	-	255,514
	1.3 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Politik dan Komunikasi Tahun 2011	384,173	-	384,173
	1.4 Koordinasi dan Pemantauan Kerjasama RI-USAID (Pengelolaan Dana Hibah USAID - To Support Democracy and Governance Program in Indonesia)	341,341	-	341,341
	1.5 Koordinasi Pelaksanaan Program Peace Corps Di Indonesia	229,880	-	229,880
	1.6 Prakarsa Strategis Reformasi Pengelolaan Proses Kebijakan Publik/Pengelolaan Dana Hibah IDI	118,935	-	118,935
	1.7 Koordinasi Perencanaan Program Pembangunan Bidang Analisa Peraturan Perundang-undangan	-	883,600	883,600
5	Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan	1,606,000	-	1,606,000
	1.1 Koordinasi Perencanaan Program Pembangunan Bidang Analisa Peraturan Perundang-undangan	350,000	-	350,000
	1.2 Monitoring Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Analisa Peraturan Perundang-undangan	350,000	-	350,000
	1.3 Evaluasi Kinerja Pembangunan di bidang Perundang-undangan	250,000	-	250,000
	1.4 Sosialisasi dan Fasilitasi Model Analisa Peraturan Perundang-undangan Bidang Infrastruktur	656,000	-	656,000
3	<u>KEDEPUTIAN BIDANG KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN, DAN UKM</u>	5,500,000	945,377	6,445,377
	1 Direktorat Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja	1,300,000	-	1,300,000
	1.1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Dalam Rangka Memperluas Kesempatan Kerja	300,000	-	300,000
	1.2 Pemantauan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pekerja Migran	250,000	-	250,000
	1.3 Evaluasi Pelaksanaan Fokus Prioritas Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Th 2010	300,000	-	300,000
	1.4 Analisis Pencapaian Indikator 'Decent Work' Indonesia	400,000	-	400,000
	1.5 Penguatan Sekretariat Jejaring Angkatan Kerja Usia Muda (JEJAKMU)	50,000	-	50,000
	2 Direktorat Penanggulangan Kemiskinan	1,800,000	945,377	2,745,377
	1.1 Pemantauan Integrasi Perencanaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan	250,000	-	250,000
	1.2 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Kemiskinan	300,000	-	300,000
	1.3 Evaluasi Karakteristik Dan Program Penanggulangan Kemiskinan Di Daerah	250,000	-	250,000
	1.4 Sekretariat PPK	250,000	-	250,000
	1.5 Koordinasi Kebijakan Perencanaan Program Pembangunan Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM	250,000	-	250,000
	1.6 Kajian Micro Finance for The Poor	400,000	-	400,000
	1.7 Policy paper: Road Map FNPM Mandiri	100,000	-	100,000

1.8 Peningkatan ...

NO	PROGRAM/UNIT KERJA ESELON I DAN II/ KOMPONEN	RM	PHLN	TOTAL
1	2	3	4	5=(3+4)
	1.8 Peningkatan Kapasitas Pemda	-	445,377	445,377
	1.9 MIS PNPM II	-	500,000	500,000
3	Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat	1,150,000	-	1,150,000
	1.1 Kajian Penyediaan Skema Asuransi Sosial bagi Pekerja Informal	400,000	-	400,000
	1.2 Evaluasi Program-Program Perlindungan Sosial (Kelompok Usaha Bersama - KUBE, Kementerian Sosial)	200,000	-	200,000
	1.3 Pemantauan Pelaksanaan Program-Program Perlindungan Sosial	250,000	-	250,000
	1.4 Koordinasi Perencanaan Program-Program Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat	300,000	-	300,000
4	Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM	1,250,000	-	1,250,000
	1.1 Evaluasi Program-Program Pemberdayaan Koperasi dan UKM	300,000	-	300,000
	1.2 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kewirausahaan UMKM dengan Fokus Kewirausahaan di Sektor Energi	400,000	-	400,000
	1.3 Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan dan Sosialisasi Koordinasi RPJMN Tahun 2010-2014 di Bidang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	300,000	-	300,000
	1.4 Pemantauan Pelaksanaan Program-Program Pemberdayaan UMKM dan Koperasi Tahun 2011	250,000	-	250,000
4	KEDEPUTIAN BIDANG EKONOMI	10,048,239	1,000,000	11,048,239
1	Direktorat Keuangan Negara	2,360,800	-	2,360,800
	1.1 Pemantauan Pelaksanaan RPJM 2010-2014 dan RKP 2011 Bidang Keuangan Negara	362,000	-	362,000
	1.2 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Keuangan Negara	512,000	-	512,000
	1.3 Evaluasi Pelaksanaan RKP Tahun 2010 dan RPJM 2010-2014 Bidang Keuangan Negara	362,000	-	362,000
	1.4 Kajian Optimalisasi Penerimaan Pajak Pemerintah Pusat	400,000	-	400,000
	1.5 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kedeputian Bidang Ekonomi	364,800	-	364,800
	1.6 Sekretariat PPK	250,000	-	250,000
	1.7 Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi DAK	110,000	-	110,000
2	Direktorat Jasa Keuangan dan Analisis Moneter	1,365,052	1,000,000	2,365,052
	1.1 Koordinasi dan Pemantauan Kerjasama RI-USAID di Bidang Pertumbuhan Ekonomi	503,766	-	503,766
	1.2 Penyusunan Policy Paper	100,000	-	100,000
	1.3 Evaluasi Pelaksanaan RKP Tahun 2010 Bidang Jasa Keuangan dan Analisis Moneter	223,638	-	223,638
	1.4 Pemantauan Pelaksanaan RPJMN 2010-2014 Bidang Jasa Keuangan dan Analisis Moneter	274,258	-	274,258
	1.5 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Jasa Keuangan dan Analisis Moneter Tahun 2011	263,390	-	263,390
	1.6 Hibah USAID - Economic Growth Programs In Indonesia	-	1,000,000	1,000,000
3	Direktorat Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi	1,665,878	-	1,665,878
	1.1 Koordinasi Perencanaan Perdagangan, Investasi, dan KEI	442,320	-	442,320
	1.2 Evaluasi Pelaksanaan RKP tahun 2009 dan RPJMN 2010-2014 bidang Perdagangan, Investasi dan KEI	343,781	-	343,781
	1.3 Kajian Bidang Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional	400,000	-	400,000
	1.4 Pemantauan Pelaksanaan RPJMN 2010-2014 dan RKP 2011 bidang Perdagangan, Investasi, dan KEI	370,276	-	370,276
	1.5 Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan DAK	109,501	-	109,501

4. Direktorat ...

NO	PROGRAM/UNIT KERJA ESELON I DAN II/ KOMPONEN	RM	PHLN	TOTAL
1	2	3	4	5=(3+4)
4	Direktorat Industri, IPTEK dan BUMN	1,072,000	-	1,072,000
1.1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Industri, Iptek, dan BUMN	418,920	-	418,920
1.2	Pemantauan di Direktorat Industri, Iptek dan BUMN	315,880	-	315,880
1.3	Evaluasi RKP Industri, Iptek dan BUMN	337,200	-	337,200
5	Direktorat Perencanaan Makro	3,584,509	-	3,584,509
1.1	Kajian Dinamika Perekonomian Global Saat Ini dan Kedepan	400,000	-	400,000
1.2	Evaluasi Pelaksanaan RKP 2010 dan RPJM 2010-2014 Bidang Ekonomi Makro	370,849	-	370,849
1.3	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Makro	444,286	-	444,286
1.4	Pemantauan Pelaksanaan RPJM 2010-2014 dan RKP Tahun 2011 Bidang Ekonomi Makro	369,374	-	369,374
1.5	Kajian Model Ekonomi Makro	2,000,000	-	2,000,000
5	<u>KEDEPUTIAN BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP</u>	<u>10,310,000</u>	<u>5,445,000</u>	<u>15,755,000</u>
1	Direktorat Pangan dan Pertanian	1,560,000	-	1,560,000
1.1	Kajian Dampak dan Efektifitas Kredit Program Thd Kinerja dan Pendapatan Usahatani	400,000	-	400,000
1.2	Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pangan dan Pertanian	400,000	-	400,000
1.3	Pemantauan Pelaksanaan RKP 2011 Bidang Pangan Pertanian	300,000	-	300,000
1.4	Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pangan dan Pertanian	350,000	-	350,000
1.5	Koordinasi Strategis Kebijakan Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi DAK	110,000	-	110,000
2	Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	1,660,000	-	1,660,000
1.1	Kajian Dampak Ekonomi Konservasi Sumber Daya Air Dengan Pendekatan Ekosistem dan Konstruksi terhadap Ketahanan Sumber Daya Air Yang Berkelanjutan	400,000	-	400,000
1.2	Koordinasi Program dan Kebijakan Sektor Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	300,000	-	300,000
1.3	Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah	400,000	-	400,000
1.4	Pemantauan Pelaksanaan Program dan Kebijakan Sektor Kehutanan dan Konservasi Sumberdaya Air	250,000	-	250,000
1.5	Evaluasi Kebijakan dan Program Pembangunan Sektor Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	200,000	-	200,000
1.6	Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi DAK	110,000	-	110,000
3	Direktorat Kelautan dan Perikanan	2,010,000	-	2,010,000
1.1	Policy Paper: Penanggulangan Pulau-pulau kecil	100,000	-	100,000
1.2	Kajian Strategis: Pengembangan Pemasaran Produk Perikanan Dalam Rangka Mengantisipasi Peningkatan Produksi Perikanan	400,000	-	400,000
1.3	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan	350,000	-	350,000
1.4	Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan	300,000	-	300,000
1.5	Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan	250,000	-	250,000

1.6 Koordinasi ...

NO	PROGRAM/UNIT KERJA ESELON I DAN II/ KOMPONEN	RM	PHLN	TOTAL
1	2	3	4	5=(3+4)
	1.6 Koordinasi Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan (Kedeputian)	500,000	-	500,000
	1.7 Koordinasi Penyusunan Kebijakan Perencanaan, Penyusunan dan Evaluasi DAK	110,000	-	110,000
4	Direktorat Lingkungan Hidup	3,380,000	5,445,000	8,825,000
	1.1 Koordinasi Penyusunan RKP 2012 Bidang Lingkungan Hidup dan Program Pembangunan Lingkungan Hidup Strategis Lainnya	400,000	-	400,000
	1.2 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Hibah Perubahan Iklim dan Lingkungan Hidup (Pendukung)	600,000	-	600,000
	1.3 Monitoring Pelaksanaan RKP 2011 Bidang Lingkungan Hidup	250,000	-	250,000
	1.4 Evaluasi Pelaksanaan RKP 2010 Bidang Lingkungan Hidup	200,000	-	200,000
	1.5 Koordinasi Strategis Penyiapan dan Penguatan untuk Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)	1,200,000	-	1,200,000
	1.6 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	270,000	-	270,000
	1.7 Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi DAK	110,000	-	110,000
	1.8 Kajian Sinergitas Implementasi Perjanjian Internasional Bidang Lingkungan Hidup	350,000	-	350,000
	1.9 ESP II	-	3,499,748	3,499,748
	1.10 ICCTF	-	1,945,252	1,945,252
5	Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan	1,700,000	-	1,700,000
	1.1 Penyusunan Naskah Kebijakan Utk Pengemb. Industri Pertamb. : (I) Regim Perijinan Pertamb. Mineral dan Batubara Sesudah Adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertamb. Mineral dan Batubara (II)	800,000	-	800,000
	1.2 Evaluasi Pelaksanaan RPJMN 2010-2014 dan RKP 2011 Bidang Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan	300,000	-	300,000
	1.3 Koordinasi Pembangunan Bidang Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan	350,000	-	350,000
	1.4 Pemantauan Pelaksanaan RKP 2011 Bidang Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan	250,000	-	250,000
6	<u>KEDEPUTIAN BIDANG SARANA DAN PRASARANA</u>	<u>23,597,170</u>	<u>47,892,711</u>	<u>71,489,881</u>
	1 Direktorat Energi, Telekomunikasi dan Informatika	1,560,000	-	1,560,000
	1.1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Energi, Ketenagalistrikan, Komunikasi dan Informatika	375,000	-	375,000
	1.2 Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Sektor Energi, Ketenagalistrikan, Komunikasi dan Informatika	350,000	-	350,000
	1.3 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Sektor Energi, Ketenagalistrikan, Komunikasi dan Informatika	225,000	-	225,000
	1.4 Kajian Pengembangan Kebijakan dan Strategi Pembiayaan e-Governance Nasional	400,000	-	400,000
	1.5 Policy Paper: Revitalisasi Lembaga Penyiaran Publik Untuk Mendukung Terwujudnya Masyarakat Informasi Indonesia	100,000	-	100,000
	1.6 Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan DAK Bidang Energi Baru Terbarukan Untuk Pemenuhan Energi dan Listrik Perdesaan (LISDES EBT)	110,000	-	110,000
	2 Direktorat Transportasi	2,612,396	3,833,677	6,446,073

NO	PROGRAM/UNIT KERJA ESELON I DAN II/ KOMPONEN	RM	PHLN	TOTAL
1	2	3	4	5=(3+4)
1.1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Transportasi Tahun 2011	338,796	-	338,796
1.2	Koordinasi Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan Transportasi Jalan	664,800	-	664,800
1.3	Monitoring Pelaksanaan Program Pembangunan Sektor Transportasi	300,000	-	300,000
1.4	Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Sektor Transportasi	267,000	-	267,000
1.5	Policy Paper Kebijakan Penanganan Jalan Melalui Performance Based Contract	100,000	-	100,000
1.6	Policy Paper: Kebijakan Pemberdayaan Armada Pelayaran Niaga Nasional	100,000	-	100,000
1.7	Policy paper: Pembiayaan Pengadaan Pesawat Udara Dalam Mendukung Angkutan Perintis Udara	100,000	-	100,000
1.8	Policy paper: Revitalisasi Angkutan Umum Perkotaan	100,000	-	100,000
1.9	Policy paper: Transportasi Berwawasan Lingkungan	100,000	-	100,000
1.10	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana	211,800	-	211,800
1.11	Developong a New Approach to an Integrated Transportation Management System	-	3,833,677	3,833,677
1.12	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan PPK Deputi Bidang Sarana dan Prasarana	220,000	-	220,000
1.13	Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan, Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana alokasi Khusus (DAK) Sektor Transportasi	110,000	-	110,000
3	Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta	14,103,514	25,872,955	39,976,469
1.1	Sekretariat Pelaksanaan Harian Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI)	400,000	-	400,000
1.2	Koordinasi Penyusunan Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta Bidang Infrastruktur	300,000	-	300,000
1.3	Pemantauan Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta Bidang Infrastruktur	250,000	-	250,000
1.4	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta Bidang Infrastruktur	200,000	-	200,000
1.5	Kajian Proyek Atas Prakarsa Badan Usaha (Unsolicited Project) dalam Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur	400,000	-	400,000
1.6	Sekretariat Koordinasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta Bappenas-BKPM	2,000,000	-	2,000,000
1.7	Infrastructure Reform Sector Development Program-RM	8,703,514	-	8,703,514
1.8	Pendampingan Pelaksanaan Hibah JICA (Operasional P3CU dan Japanese Window PDF)	850,000	-	850,000
1.9	Pelaksanaan penyusunan dan Pembaruan PPP -BOOK 2010 2014	1,000,000	-	1,000,000
1.10	Infrastructure Reform Sector Development Program (PHLN)	-	25,872,955	25,872,955
4	Direktorat Permukiman dan Perumahan	1,686,260	5,186,079	6,872,339
1.1	Kajian Prioritas Sektor Perumahan dan Permukiman dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	400,000	-	400,000
1.2	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Nasional Di Bidang Permukiman dan Perumahan	310,000	-	310,000
1.3	Pemantauan Perencanaan Pembangunan Nasional Di Bidang Permukiman dan Perumahan	260,000	-	260,000
1.4	Evaluasi Perencanaan Pembangunan Nasional Di Bidang Permukiman dan Perumahan	240,000	-	240,000

NO	PROGRAM/UNIT KERJA ESELON I DAN II/ KOMPONEN	RM	PHLN	TOTAL
1	2	3	4	5=(3+4)
1.5	Slum Allevation Policy and Action Plan/SAPOLA) - Grant Cities Alliance	-	500,000	500,000
1.6	Indonesia Water and Sanitation Policy and Action Planning Facility (Phase III)/WASPOLA	-	1,100,000	1,100,000
1.7	Sekretariat Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh (Slum Alleviation Policy and Action Plan)	290,000	-	290,000
1.8	Sekretariat Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan / WASPOLA	20,000	-	20,000
1.9	Sekretariat WASAP-E 2011	56,260	-	56,260
1.10	WASAP-E	-	3,586,079	3,586,079
1.11	Koordinasi Strategis Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi DAK Bidang Air Minum, Sanitasi, Perumahan dan Permukiman	110,000	-	110,000
5	Direktorat Pengairan dan Irigasi	3,635,000	13,000,000	16,635,000
1.1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Air	300,000	-	300,000
1.2	Monitoring Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Sumber Daya Air	250,000	-	250,000
1.3	Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Sumber Daya Air	300,000	-	300,000
1.4	Kajian Penyelesaian Konflik Pengelolaan Bidang Sumber Daya Air Terpadu	400,000	-	400,000
1.5	Sekretariat Tim Pengarah Nasional Sumber Daya Air/Koordinasi Strategis	900,000	-	900,000
1.6	Water Resources and Irrigation Sector Management Project (WISMP)	-	200,000	200,000
1.7	Dam Operation Improvement and Safety Project (DOISP) - WB	225,000	500,000	725,000
1.8	Participatory Irrigation Sector Project	-	1,000,000	1,000,000
1.9	Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program (ICWRMIP)	900,000	7,000,000	7,900,000
1.10	Decentralized Irrigation System Improvement Project in Eastern Region of Indonesia (DISMP II)	-	2,100,000	2,100,000
1.11	Participatory Irrigation Rehabilitation and Improvement Management Project (PIRIMP) - JICA	-	1,700,000	1,700,000
1.12	Urban Flood Control - JICA	-	500,000	500,000
1.13	Sekretariat PPK Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu	250,000	-	250,000
1.14	Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pemantauan dan Evaluasi DAK	110,000	-	110,000
7	<u>KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTONOMI DAERAH</u>	17,204,490	17,746,808	34,951,298
1	Direktorat Otonomi Daerah	4,567,130	4,000,000	8,567,130
1.1	Evaluasi Pelaksanaan RKP 2010 Lingkup Kerja Direktorat Otonomi Daerah	250,000	-	250,000
1.2	Pemantauan/Monitoring Pelaksanaan RKP 2011 Lingkup Kerja Direktorat Otonomi Daerah	250,000	-	250,000
1.3	Koordinasi Pelaksanaan RKP 2011 Dan Penyusunan RKP 2012	328,630	-	328,630
1.4	Koordinasi Strategis Pelaksanaan Program Provincial Governance Strengthening Programme and Articulating Governance and Local Governance in Indonesia	500,000	-	500,000
1.5	Kajian Kualitas Belanja APBD	500,000	-	500,000

1.6 Koordinasi ...

NO	PROGRAM/UNIT KERJA ESELON I DAN II/ KOMPONEN	RM	PHLN	TOTAL
1	2	3	4	5=(3+4)
1.6	Koordinasi Strategis Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program Prakarsa Pembaruan (P2TPD/ILGR)	500,000	-	500,000
1.7	Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pemantauan dan Evaluasi DAK TA 2011 (Sekretariat)	2,128,500	-	2,128,500
1.8	Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pemantauan dan Evaluasi DAK TA 2011 Bidang Prasarana Pemerintahan	110,000	-	110,000
1.9	Program Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD)	-	3,000,000	3,000,000
1.10	Program PGSP	-	1,000,000	1,000,000
2	Direktorat Perkotaan dan Perdesaan	3,100,000	-	3,100,000
1.1	Kajian Pengembangan Indeks Pembangunan Perkotaan	400,000	-	400,000
1.2	Koordinasi Strategis Pembangunan Perkotaan Nasional	600,000	-	600,000
1.3	Koordinasi Strategis Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Lokal	800,000	-	800,000
1.4	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Nasional (RKP) di Bidang Pembangunan Perkotaan, Pembangunan Perdesaan,	300,000	-	300,000
1.5	Pemantauan Program dan Kegiatan Bidang Perkodes dan Agropolitan	250,000	-	250,000
1.6	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Perkotaan, dan Pembangunan Perdesaan	200,000	-	200,000
1.7	Koordinasi Deputi Bidang Pengembangan Regional dan OTDA	300,000	-	300,000
1.8	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan PPK Deputi Pengembangan Regional dan OTDA	250,000	-	250,000
3	Direktorat Pengembangan Wilayah	2,678,862	6,092,458	8,771,320
1.1	Kajian Strategis Pengembangan Model Pertumbuhan Investasi Daerah	399,998	-	399,998
1.2	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Nasional (RKP) Bidang Pengembangan Wilayah	250,000	-	250,000
1.3	Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Nasional (RKP) Bidang Pengembangan Wilayah	200,000	-	200,000
1.4	Evaluasi Pelaksanaan kebijakan Pengembangan Pembangunan Wilayah	200,000	-	200,000
1.5	Program PNPM-PISEW	628,863	-	628,863
1.6	Pengelolaan Data dan Informasi Kewilayahan Berbasis Spasial	1,000,001	-	1,000,001
1.7	Consultant Support for Central Coordination Team Fly 2010	-	6,092,458	6,092,458
4	Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal	4,110,000	7,654,350	11,764,350
1.1	Kajian Pemanfaatan Ruang di Kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara	400,000	-	400,000
1.2	Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Rawan Bencana dan Daerah Tertinggal	300,000	-	300,000
1.3	Pemantauan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pengembangan KKDT	200,000	-	200,000
1.4	Evaluasi Kebijakan Perencanaan Untuk Sinkronisasi RKP TA 2010	250,000	-	250,000
1.5	People Centered Development Program (PCDP)	-	1,000,000	1,000,000
1.6	Koordinasi Strategis The Indonesia Multi Donor Fund Facility For Disaster Recovery (IMDFF-DR)	800,000	-	800,000

NO	PROGRAM/UNIT KERJA ESELON I DAN II/ KOMPONEN	RM	PHLN	TOTAL
1	2	3	4	5=(3+4)
1.7	Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Daerah Pasca Konflik (P2DTDPK)	750,000	-	750,000
1.8	Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pengendalian Penanganan Bencana (P3B)	500,000	-	500,000
1.9	Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat dan Sulteng	300,000	-	300,000
1.10	Safer Communities Through Disaster Risk Reduction in Development	-	2,500,000	2,500,000
1.11	Technical Support Rehabilitation and Reconstruction Completion and Continued Coordination (R2C3)	-	3,200,000	3,200,000
1.12	Sekretariat Koordinasi Program KPKRR NAD Nias	500,000	-	500,000
1.13	Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi DAK	110,000	-	110,000
1.14	Peace Through Development Program	-	954,350	954,350
5	Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan	2,748,498	-	2,748,498
1.1	Kajian Kebijakan Insentif dan Disinsentif Tata Ruang dalam Pembangunan Nasional	399,999	-	399,999
1.2	Koodinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Bidang Tata Ruang dan Pertanahan	299,999	-	299,999
1.3	Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Tata Ruang dan Pertanahan	300,000	-	300,000
1.4	Evaluasi Pembangunan Bidang Tata Ruang dan Pertanahan	250,000	-	250,000
1.5	Koordinasi Strategis Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional	1,498,500	-	1,498,500
8	KEDEPUTIAN BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN	18,349,838	16,188,349	34,538,187
1	Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan	2,887,773	-	2,887,773
1.1	Kajian Analisa Pengembangan Mekanisme Pendanaan Pembangunan	366,430	-	366,430
1.2	Evaluasi Perencanaan Pendanaan Pembangunan	281,205	-	281,205
1.3	Koordinasi Perencanaan Pendanaan Pembangunan	633,213	-	633,213
1.4	Pemantauan Terhadap Rencana Pendanaan Pembangunan	234,440	-	234,440
1.5	Perencanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Bidang Pendanaan Pembangunan (Kedeputian)	462,489	-	462,489
1.6	Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan di Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan (PPK)	259,521	-	259,521
1.7	Koordinasi Penyusunan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Tentang Pinjaman dan Hibah Pemerintah	329,175	-	329,175
1.8	Diseminasi Peraturan Mengenai Pinjaman dan Hibah Pemerintah	321,300	-	321,300
2	Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan	2,711,981	999,150	3,711,131
1.1	Kajian Alokasi Pendanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	154,897	-	154,897
1.2	Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2011	322,285	-	322,285
1.3	Pemantauan Alokasi Pendanaan Pembangunan Tahun 2011	130,542	-	130,542
1.4	Evaluasi Alokasi Pendanaan Pembangunan Tahun 2011	163,794	-	163,794
1.5	Koordinasi Strategis Reformasi Perencanaan dan Penganggaran	1,600,000	-	1,600,000
1.6	Pengembangan dan Pemutakhiran Databse Pendanaan Pembangunan Tahun 2011	230,463	-	230,463
1.7	Reformasi Perencanaan & Penganggaran (PFM-MDTF)	-	999,150	999,150

1.8 Koordinasi ...

NO	PROGRAM/UNIT KERJA ESELON I DAN II/ KOMPONEN	RM	PHLN	TOTAL
1	2	3	4	5=(3+4)
1.8	Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan, Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi DAK	110,000	-	110,000
3	Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateral	9,647,356	12,000,000	21,647,356
1.1	Koordinasi Perencanaan Pendanaan Luar Negeri Bilateral	418,273	-	418,273
1.2	Koordinasi Pendukung Sekretariat Technical Assistance And Consultation For Aid Effectiveness Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateral	955,537	-	955,537
1.3	Pemantauan Proyek - Proyek Yang Didanai PHLN Bilateral Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateral	249,939	-	249,939
1.4	Evaluasi Pelaksanaan Jakarta Commitment Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateral	230,480	-	230,480
1.5	Policy Paper: Tema - Partisipasi CSO Dalam Perencanaan Kegiatan Yang Dibiayai Pinjaman Luar Negeri Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateral	100,000	-	100,000
1.6	Koordinasi Sekretariat Persiapan dan Pengembangan Millenium Challenge Corporation (MCC) Compact	7,343,127	-	7,343,127
1.7	Policy Paper: Tema - Pembiayaan Bilateral Dengan Skema Credit Line Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateral	100,000	-	100,000
1.8	TMDf UNDP untuk A4DES	-	4,000,000	4,000,000
1.9	Persiapan MCC Compact	-	8,000,000	8,000,000
1.10	Sekretariat PPK Kegiatan Koordinasi Sekretariat Persiapan dan Pengembangan MCC	250,000	-	250,000
4	Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral	1,396,313	3,189,199	4,585,512
1.1	Kajian Peningkatan Peranan Indonesia dalam Lembaga-Lembaga Pembiayaan Multilateral	399,931	-	399,931
1.2	Koordinasi Penyiapan Program/Proyek yang akan dibiayai Pinjaman/Hibah Luar Negeri Multilateral	299,847	-	299,847
1.3	Pemantauan Perencanaan Kegiatan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Multilateral	249,721	-	249,721
1.4	Kegiatan Pendukung Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan international fund for agricultural Development (IFAD)	149,726	-	149,726
1.5	Pendukung Hibah Luar Negeri Enhancing Capacity for better aid Management (ECBAM)	149,094	-	149,094
1.6	Kegiatan Pendukung Hibah Luar negeri dari ADB Technical assistance for strengthening knowledge management for effective project planning and implementation (SKMEPPI)	147,994	-	147,994
1.7	Hibah UNDP-Enhancing Capacity for Better Aid Management (ECBAM)	-	1,894,999	1,894,999
1.8	Hibah ADB-Technical Assistance for strengthening knowledge management for effective project planning and implementation (SKMEPPI)	-	1,294,200	1,294,200
5	Direktorat Pendayagunaan Pendanaan Pembangunan	1,706,415	-	1,706,415
1.1	Kajian Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab	400,000	-	400,000
1.2	Koordinasi Pendayagunaan Pembangunan dan Penyusunan Pagu Indikatif	650,000	-	650,000
1.3	Koordinasi Pendukung Hibah Aid Information Management System	350,000	-	350,000
1.4	Pemantauan Pendayagunaan Pendanaan Pembangunan	306,415	-	306,415

NO	PROGRAM/UNIT KERJA ESELON I DAN II/ KOMPONEN	RM	PHLN	TOTAL
1	2	3	4	5=(3+4)
9	<u>KEDEPUTIAN BIDANG EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN</u>	10,924,936	-	10,924,936
1	Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	8,124,936	-	8,124,936
1.1	Pilot Project Penerapan Sistem Evaluasi Kinerja Pembangunan di 7 Daerah Percontohan	400,000	-	400,000
1.2	Evaluasi Ex-Ante Rencana Pembangunan Daerah	284,076	-	284,076
1.3	Monitoring Proses Penyusunan RKPD dan APBD 2012	247,524	-	247,524
1.4	Koordinasi Evaluasi Pembangunan Daerah 2011 di 33 Propinsi	6,643,336	-	6,643,336
1.5	Koordinasi Pembangunan Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan	300,000	-	300,000
1.6	PPK Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan	250,000	-	250,000
2	Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral	1,650,000	-	1,650,000
1.1	Kajian Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral	400,000	-	400,000
1.2	Policy Paper Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral	100,000	-	100,000
1.3	Penyusunan Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral	300,000	-	300,000
1.4	Koordinasi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral	250,000	-	250,000
1.5	Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional	600,000	-	600,000
3	Direktorat Sistem dan Pelaporan Hasil Evaluasi Kinerja	1,150,000	-	1,150,000
1.1	Policy paper: Aspek-aspek Penyempurnaan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 sesuai dengan Reformasi Perencanaan dan Penganggaran	400,000	-	400,000
1.2	Evaluasi Terhadap Kelengkapan Sistem Moneyv Pembangunan Nasional	200,000	-	200,000
1.3	Koordinasi Pengembangan Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan	300,000	-	300,000
1.4	Pemantauan Penyempurnaan Format Monitoring Program dan Kegiatan Pembangunan Nasional	250,000	-	250,000

 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



ARMIDA S. ALISJAHBANA